

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Simpulan

Kadipaten Mangkunegaran merupakan suatu kerajaan yang berdiri sejak tahun 1757 hingga 1945, dengan pendirinya yaitu Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara I. Kadipaten Mangkunegaran merupakan mekaran dari Kasunanan Surakarta Hadinigrat, yang diberikan atas dasar Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757. Kadipaten Mangkunegaran pada dasarnya merupakan suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Adipati. Saat masa Pemerintahan Hindia Belanda, Mangkunegaran dianggap sebagai daerah istimewa, atau *zelfbestuur*, begitupun pada masa Penududukan Jepang dengan istilah *Kooti*, dengan raja yang memimpin disebut sebagai *Koo*. Namun saat revolusi setelah kemerdekaan terjadi Mangkunegaran kehilangan statusnya sebagai daerah istimewa dikarenakan terjadinya suatu gerakan yang dinamakan Gerakan Anti Swapraja. Di bawah ini poin pembahasan mengenai simpulan dari ketiga rumusan masalah yang diambil.

Pertama, di masa awal revolusi adipati yang memerintah yaitu Mangkunegara VIII dengan nama Bandara Raden Mas Hario Hamidjojo Saroso, dia merupakan anak dari Mangkunegara VII yang wafat pada 1944. Di masa Mangkunegara VII, Mangkunegaran berada di masa jayanya, setelah sebelumnya mengalami krisis di masa Mangkunegara V, namun diperbaiki dengan berhemat di masa Mangkunegara VI maka di masa Mangkunegara VII merupakan masa puncak kejayaan Mangkunegaran. Masyarakatnya di masa ini heterogen, berbagai etnis, diantaranya Eropa, Tionghoa, Arab, dan juga pribumi lokal. Walaupun interaksi antara etnis satu dan lainnya tergolong sedikit panas. Di masa ini orang-orang eropa memegang status tertinggi dalam stratifikasinya di masyarakat, disusul dengan kaum pendatang (Tionghoa, Arab) dan dipaling bawah yaitu pribumi. Adapun kepercayaan masyarakat di masa diantaranya Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu, dan agama daerah campuran antara Islam dan kebudayaan Jawa bernama Kejawen. Di sistem pemerintahan, Mangkunegara VII wafat pada masa Pendudukan Jepang, yang menyebabkan masih terjadinya peralihan sosial di masyarakat. Di masa pendudukan Jepang masyarakat hidup dalam ketakutan, pembubaran Legiun Mangkunegaran menyebabkan Mangkunegaran tidak

Muhamad Rio Novandana, 2023

**DAMPAK GERAKAN ANTI SWAPRAJA BAGI KADIPATEN MANGKUNEGARAN DI MASA PEMERINTAHAN MANGKUNEGARA VIII (1944-1974)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mempunyai tentaranya sendiri lagi. Dalam melakukan administrasinya Mangkunegara diawasi oleh Jepang. Perusahaan-perusahaan juga sempat berhenti beroperasi akibat adanya perpindahan kekuasaan ini, walaupun akhirnya bisa dioperasikan kembali. Setelah kekalahan Jepang maka berpindah kekuasaan berada di tangan Republik. Di masa ini terjadi pergolakan antara masyarakat pro swpraja dan anti swpraja, hal ini terjadi karena Mangkunegaran dinilai tidak membantu dalam pelaksanaan revolusi yang terjadi di Surakarta.

Kedua, akibat tidak tersusunnya Undang-Undang Pemerintah Daerah Surakarta oleh KNID menyebabkan orang-orang yang tidak menginginkan adanya swpraja merajalela semakin luas di masyarakat. Kondisi ekonomi yang sulit disebabkan tidak berfungsi dengan benar perkebunan dan pertanian milik Mangkunegaran yang menyebabkan harga di pasar meningkat. Gerakan ini dipelopori oleh Dr. Moewardi dan kawanannya Tan Malaka yang terganung dalam Gerakan Banteng. Keadaan ini semakin tidak kondusif, sehingga pemerintah pusat mengambil alih pemerintahan di Surakarta dengan dikeluarkannya Penetapan Pemerintah No. 16/SD tahun 1946. Pergolakan lain terjadi setelahnya, pemerintah pusat menganggap dengan diturunkannya penetapan diatas jika sejatinya Swpraja Surakarta sudah tidak ada, namun ditentang oleh Mangkunegara dan Kasunanan dengan berbagai cara. Sebagai penegasan, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai Penegasan Kedudukan Daerah Istimewa Surakarta dan Mangkunegaran, yang menyebutkan sudah tidak adanya lagi swpraja di Surakarta.

Ketiga, setelah tidak berbentuk daerah swpraja Mangkunegara VIII sibuk dengan mengurus urusan seperti keadaan sosial di sekitaran Praja, lalu penegasan jika pegawai Mangkunegaran (abdi dalem) merupakan ASN. Namun hal yang paling diperjuangkan oleh Mangkunegara VIII adalah mengenai aset-aset milik Mangkunegaran yang dinasionalisasi oleh pemerintah pusat. Komisi Dana Milik Mangkunegaran dibuat untuk melindungi aset-aset Mangkunegaran. Pemindahan hak kepemilikan aset juga dipindah menjadi kepemilikan pribadi Mangkunegara. Namun hak tersebut tidak menyelesaikan masalah, bagaimanapun nasionalisasi aset-aset Mangkunegaran tetap dilakukan setelah kalahnya Mangkunegaran dalam persidangan. Yang kemudian untuk menghidupi perekonomian Mangkunegaran dibangun beberapa perusahaan milik Mangkunegaran.

Keempat, dalam bidang sosial di masa setelah terjadinya masih dalam kondisi yang bisa dikatakan baik. Bagaimana dalam kehidupan sosial di Mangkunegaran masih banyak terjadinya kerusuhan seperti penculikan, pembunuhan, penjarahan dan pembakaran yang dilakukan dengan memanfaatkan kondisi Surakarta yang masih belum benar benar pulih. Hal ini menimbulkan turunnya divisi-divisi tentara nasional untuk membertas adanya tindakan-tindakan kerusuhan di Surakarta. Adapun stratifikasi sosial masyarakat masih heterogen, namun klasifikasi masyarakat sudah tidak ada. Pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu hal yang meningkat pesat karena adanya pemikiran baru mengenai perempuan sejak Mangkunegara VII memerintah. Selanjutnya pemberdayaan perempuan tersebut terus berlanjut dengan Mangkunegara VIII dan istrinya, bagaimana istri dari Mangkunegara VIII aktif dalam forum-forum resmi, hal tersebut memperlihatkan jika Mangkunegara VIII juga melakukan pemberdayaan perempuan semasa memerintah. Dalam bidang budaya, penyebarluasan budaya khas Mangkunegaran dilakukan, yang saat ini kebudayaan-kebudayaan khas Mangkunegaran tersebut bisa dinikmati oleh umum, walaupun beberapa diantaranya hanya dipentaskan di waktu-waktu tertentu.

## **5.2 Rekomendasi**

### **1. Untuk Pengajar Materi Perkuliahan**

Skripsi ini dapat dijadikan suatu rujukan dalam melakukan pembelajaran sejarah di tingkatan universitas. Tertama di Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pembahasan pada skripsi ini dapat dimasukkan dalam beberapa mata kuliah, diantaranya Studi Masyarakat Indonesia, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, Sejarah Indonesia Masa Awal Kemerdekaan Sampai Demokrasi Terpimpin, Bahasa dan Sejarah Daerah, Sejarah Sosial, Sejarah Kebudayaan. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan kepada para akademisi umum yang minat akan sejarah, khususnya mengenai sejarah Indonesia masa awal kemerdekaan, dan sejarah mengenai eks-kerajaan di Jawa. Yang dimana didalamnya mencakup mengenai Kadipaten Mangkunegaran di bawah pemerintahan Mangkunegara VIII di masa awal kemerdekaan.

## 2. Untuk Guru Sekolah

Hasil dari skripsi ini yang membahas mengenai Kadipaten Mangkunegran di bawah Pemerintahan Mangkunegara VIII dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah di sekolah, khususnya tingkatan SMA se-derajat. Peneitian pada skripsi ini bisa juga digunakan dalam Kompetensi Dasar sebagaimana kurikulum yang dipergunakan di sekolah. Salah satunya dalam Kompetensi Dasar 3.2 di pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII dengan isian “Mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945-1946”.

## 3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Dalam melakukan penelitian ini peneliti juga merasa penelitian ini bisa lebih diperdalam atau diambil mengenai bagian-bagian pentingnya serta mengenai kejadian-kejadian yang se-masa. Penelitian yang dilakukan ditujukan kepada para sejarawan, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah, dan Ilmu Sejarah. Diantara hal-hal yang penulis rekomendasikan untuk dikaji mengenai Kadipaten Mangkuengaran dan Mangkunegara VII diantaranya: *Pertama*, mengenai hubungan antara Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran di masa sebelum, saat, dan setelah kemerdekaan. *Kedua*, mengenai bantuan yang dilakukan oleh Mangkunegara VIII di masa-masa revolusi sosial yang terjadi di Surakarta. *Ketiga*, mengenai aset-aset Mangkunegaran yang baru dibuat setelah dinasionalisasinya aset-aset lama milik Mangkunegaran. *Keempat*, mengenai Sri Susuhunan Pakubuwono XII di masa sebelum, saat, dan sesudah terjadinya revolusi sosial di Surakarta. Sebagaimana poin-poin topik di atas belum dan tidak dikaji dalam penelitian kali ini.

Sekian mengenai rekomendasi penulis terkait dengan penelitaian yang telah dilakukan. Penulis sangat mengharapkan agar nantinya penelitian ini dengan judul “Dampak Gerakan Anti Swapraja bagi Kadipaten Mangkunegaran di Masa Pemerintahan Mangkunegara VIII (1944-1974)” dapat menjadi manfaat dan dapat menjadi loncatan sumber yang mempermudah peneliti lainnya yang memiliki pembahasan yang memiliki lingkup yang mirip dengan penelitian ini.